

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DI DISTRIK AITINYO KABUPATEN MAYBRAT

Universitas Nani Bili Nusantara

Benyamin Antoh¹, Ronald Salomena², Hendry Jerry Jantje³

Email: benyaminantoh@gmail.com ^{1*}

ABSTRAK

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah di Distrik Aitinyo, Kabupaten Maybrat, Jenis penelitian yang digunakan disesuaikan dengan tujuan awal penelitian ini yaitu memahami memahami pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah di Distrik Aitinyo, Kabupaten Maybrat. Maka dari itu jenis penelitian digunakan adalah metode-penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini Adalah kepada Distrik, aparat pemeritahan Distrik, tokoh masyarakat, dan masyarakat Distrik Aitinyo kabupaten Maybrat , melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif bersifat induktif. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintahan distrik memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan publik di tingkat lokal, berfokus pada pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan Distrik Aitinyo menghadapi tantangan terkait birokrasi yang kompleks, infrastruktur yang tidak memadai, dan kualitas sumber daya manusia yang rendah. Serta membuka saluran bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Kata Kunci: Pemerintahan Distrik, Pelayanan Publik, Kebijakan Publik, Partisipasi Masyarakat, Distrik Aitinyo

ABSTRACT

The general objective of this study is to understand the implementation of government duties and functions in governance in Aitinyo District, Maybrat Regency. The type of research used is aligned with the initial objective of this study, namely to understand the implementation of government duties and functions in governance in Aitinyo District, Maybrat Regency. Therefore, the type of research used is qualitative research methods. Data sources in this study were the District Head, District government officials, community leaders, and the Aitinyo District community, Maybrat Regency, through observation, interviews, and documentation. The data analysis used in this study is an inductive qualitative analysis. Based on the research results, the District Government plays a crucial role in implementing public policy at the local level, focusing on services, development, and community empowerment. The Aitinyo District Government faces challenges related to complex bureaucracy, inadequate infrastructure, and low-quality human resources. Opening channels for community participation in the decision-making process can strengthen public trust in the government.

Keywords: District Government, Public Services, Public Policy, Community Participation, Aitinyo District



PENDAHULUAN

Pemerintah adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik kepada warganya. Dalam upaya tersebut, peran pokok pemerintah adalah menyediakan berbagai layanan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat suatu negara atau wilayah (Sutarman dkk, 2021:11). Poin ini menjelaskan bahwa konsep pemerintah adalah melayani kepentingan rakyat dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Artinya keberadaan pemerintah di suatu Negara atau wilayah harus mampu memberikan manfaat pelayanan yang dapat dirasakan oleh masyarakat di Negara atau wilayah tersebut.

Di Indonesia peran penting pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) diatur dalam tugas dan fungsi pemerintah. Tugas dan fungsi pemerintah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Tugas pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan ini adalah landasan bagi fungsi pemerintahan itu sendiri. Artinya dalam menjalankan tugas harus merujuk pada fungsi pemerintahan yang di amankan dalam Undang- Undang. Tugas pemerintah sebagai landasan dari fungsi pemerintahan dapat dilihat lebih spesifik seperti fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Press Stillman II, 2015:56). Selain itu, tugas pemerintah juga dapat diuraikan lebih lanjut dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur sektor-sektor tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan sebagainya (Dye, 2017: 75). Tugas pemerintah dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat serta negara, dan biasanya diatur dalam berbagai peraturan dan undang-undang yang relevan.

Maka dari itu keberadaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan mempunyai arti yang sangat penting pada suatu wilayah atau daerah tertentu. Suatu Kecamatan atau Distrik merupakan bagian dari pemerintah daerah yang selalu menjadi sasaran program-program dari hampir semua instansi pemerintah. Keberhasilan atau kegagalan program-program yang dijalankan sangat bergantung pada bagaimana pemerintahan Kecamatan atau Distrik melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di wilayah administrasinya masing-masing.

Keberhasilan maupun kegagalan program-program pemerintah yang dijalankan oleh pemerintahan Kecamatan atau Distrik di suatu wilayah akan berdampak pada masyarakat di wilayah tersebut. Adapun dampak positif dimana pemerintah mampu melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah dalam penyelegaraan pemerintahan maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Namun sebaliknya dampak negatif dapat dirasakan oleh masyarakat apabila pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dinilai gagal atau kurang mampu (Sutopo, 2013:11). Maka di perlukan suatu proses penyelenggaraan pemerintahan yang mampu melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintahan sebaik dan sesuai hukum dan Undang-Undang yang berlaku.

Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan atau Distrik yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan sesuai amanat Undang-Undang harus sesuai dengan perkembangan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat di wilayah administrasinya. Hal ini perlu dilakukan karena mengingat perkembangan era teknologi zaman sekarang menghadirkan banyak kebutuhan masyarakat yang lebih kompleks dan terus-menerus berkembang. Oleh karena itu diperlukan suatu pengkajian mendalam kepada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah di suatu wilayah Kecamatan atau Distrik tertentu.

Dalam penelitian ini untuk mencapai tujuan pekajian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah di suatu wilayah Kecamatan atau Distrik tertentu., peneliti memilih lokasi di Distrik Aitinyo Kabupaten Maybrat. Alasan penelitian ini dilakukan di Distrik Aitinyo Kabupaten Maybrat adalah karena Distrik Aitinyo merupakan distrik dengan jumlah penduduk terbanyak dan jumlah Kampung terbanyak di Kabupaten Maybrat dengan jumlah penduduk sebanyak 4.097 jiwa dan jumlah kampung sebanyak 29 Kampung. Selain itu Ibu Kota Kabupaten Maybrat juga berada di wilayah Distrik ini.

1. KAJIAN TEORI

Konsep Tugas dan Fungsi Pemerintah

Tugas dan Fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tugas dan fungsi pemerintah dalam teori pemerintahan mengacu pada peran dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah dalam mengelola dan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat serta menjalankan fungsi-fungsi dasar dalam suatu negara.

Definisi tugas dan fungsi pemerintah dapat bervariasi tergantung pada kerangka teoritis dan pandangan politik yang mendasarinya. Namun, secara umum, tugas dan fungsi pemerintah mencakup beberapa elemen penting (Barrow, C. W. 1993: 5)

1. **Mengatur dan Menyelenggarakan Pemerintahan:** Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan. Ini termasuk pembuatan undang-undang, regulasi, dan peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat.
2. **Legislatif:** Pemerintah biasanya memiliki fungsi legislasi, yang berarti membuat undang-undang yang mengikat dan mengatur perilaku masyarakat. Di banyak sistem pemerintahan, legislatif terdiri dari badan-badan seperti parlemen atau kongres yang membantu dalam pembuatan undang-undang.
3. **Eksekutif:** Pemerintah juga memiliki fungsi eksekutif, yang melibatkan pelaksanaan dan penegakan undang-undang dan regulasi yang telah dibuat. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
4. **Yudikatif:** Meskipun fungsi yudikatif biasanya terkait dengan sistem peradilan yang independen, pemerintah biasanya terlibat dalam pembentukan dan pemeliharaan sistem peradilan. Ini termasuk penunjukan hakim dan penyediaan sumber daya untuk sistem peradilan.
5. **Pelayanan Publik:** Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan berbagai layanan publik kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, keamanan, dan banyak lagi.
6. **Keuangan Publik:** Pemerintah mengelola keuangan publik, termasuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak dan sumber pendapatan lainnya.



7. **Pertahanan dan Keamanan:** Pemerintah bertanggung jawab atas pertahanan negara dan keamanan masyarakat, termasuk pengaturan dan pengelolaan angkatan bersenjata dan penegakan hukum.
8. **Hubungan Internasional:** Pemerintah menjalankan hubungan dengan negara-negara lain dan mewakili kepentingan nasional di tingkat internasional.
9. **Perlindungan Lingkungan:** Di era modern, perlindungan lingkungan semakin menjadi perhatian pemerintah, dan tugas mereka mencakup regulasi perlindungan lingkungan dan kebijakan pembangunan berkelanjutan.
10. **Kesejahteraan Sosial:** Pemerintah juga sering terlibat dalam program- program kesejahteraan sosial untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan warga negara, terutama kelompok yang rentan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan disesuaikan dengan tujuan awal penelitian ini yaitu memahami pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah di Distrik Aitinyo, Kabupaten Maybrat dengan menggunakan Deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah di Distrik Aitinyo

Distrik merupakan salah satu tingkatan pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan kebijakan publik di wilayah tertentu. Distrik Aitinyo, yang terletak di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, menjadi salah satu wilayah administratif yang memiliki tanggung jawab penting dalam mendukung program pemerintah daerah, baik dalam hal pembangunan maupun pelayanan publik.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak HB (Kepala Distrik Aitinyo) yang mengatakan bahwa : *Distrik memang memiliki peran penting sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dan desa. Kami bertanggung jawab memastikan bahwa kebijakan dari kabupaten dapat terlaksana dengan baik di tingkat desa, termasuk dalam hal koordinasi dan supervisi, peran ini sangat krusial dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik secara optimal di distrik ini*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat distrik menjadi krusial karena distrik berada di antara pemerintah kabupaten dan desa. Sebagai penghubung, pemerintah distrik harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten dapat dilaksanakan dengan baik di tingkat desa. Hal ini mencakup koordinasi, supervisi, dan pemberian dukungan kepada pemerintah desa.

Senada dengan penjelasan di atas, maka menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak RS (Sekretaris Distrik Aitinyo) terkait dengan fungsi dan pelayanan distrik yang mengatakan bahwa

“Fungsi pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan adalah tanggung jawab utama kami di tingkat distrik. Sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi masyarakat harus selalu menjadi prioritas”

Pernyataan di atas, mengisyaratkan bahwa secara umum, pemerintah distrik bertanggung jawab atas tiga fungsi utama : fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, dan fungsi pemberdayaan. Dalam pelaksanaannya, fungsi-fungsi ini menyentuh berbagai sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tugas ini dijalankan oleh aparat pemerintah di distrik, dengan Kepala Distrik sebagai pemimpin.



Letak geografis Distrik Aitinyo yang berada di wilayah pegunungan dengan akses transportasi yang terbatas menghadirkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pemerintah. Infrastruktur jalan yang belum memadai sering kali memperlambat distribusi bantuan dan pelaksanaan program pembangunan di desa-desa yang jauh dari pusat pemerintahan distrik. Berkaitan dengan hal tersebut maka menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak AW (Kepala Seksi Pemerintahan Distrik Aitinyo) mengatakan bahwa :

Letak geografis kami memang menjadi tantangan utama, terutama karena akses transportasi yang masih terbatas. Infrastruktur jalan yang belum memadai sering memperlambat distribusi bantuan dan pelaksanaan program, tetapi kami terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan desa untuk memastikan program-program tetap berjalan sesuai target dan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa koordinasi yang baik antara pemerintah distrik, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan tugas. Kepala Distrik berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan desa, sehingga program-program pemerintah dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan dan mencapai masyarakat secara langsung. Senada dengan penjelasan di atas, maka menurut Bapak HB (Kepala Distrik Aitinyo) mengatakan bahwa :

“Kepala Distrik memang memiliki tanggung jawab besar dalam menggerakkan seluruh aparatur dan memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai rencana. Administrasi pemerintahan harus dikelola dengan baik, mulai dari pengarsipan dokumen hingga laporan-laporan yang terkait dengan program pemerintah. Pelayanan publik, terutama yang berkaitan dengan pengurusan dokumen dan perizinan usaha, menjadi fokus utama kami untuk memastikan masyarakat menerima layanan yang cepat dan tepat. Setiap anggaran yang kami kelola, baik dari DAU maupun Dana Desa, harus sesuai dengan hasil Musrenbang dan selalu didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Aspirasi dari masyarakat terkait infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi menjadi prioritas kami dalam merencanakan pembangunan.

Pernyataan di atas, memberi isyarat bahwa Kepala Distrik memiliki peran sentral dalam menggerakkan seluruh aparatur pemerintah di tingkat distrik. Sebagai penanggung jawab utama, Kepala Distrik tidak hanya memimpin administrasi pemerintahan, tetapi juga bertindak sebagai koordinator pembangunan dan pengawas terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di wilayah kerjanya. Salah satu tugas penting pemerintah distrik adalah pengelolaan administrasi pemerintahan. Hal ini meliputi pengarsipan dokumen, penyusunan laporan, serta pengelolaan surat-menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah. Sekretaris Distrik berperan besar dalam menjaga agar administrasi pemerintahan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pelayanan publik merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah yang paling dirasakan oleh masyarakat. Di Distrik Aitinyo, pelayanan administratif seperti pengurusan perizinan usaha, surat keterangan dan dokumen yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya ekonomi masyarakat menjadi prioritas pemerintah distrik untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang memadai. Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan merupakan salah satu prinsip yang dipegang oleh pemerintah Distrik Aitinyo. Setiap penggunaan anggaran, baik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Desa, dilaksanakan berdasarkan rencana yang telah disetujui melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa. Program-program pembangunan yang dilaksanakan di Distrik Aitinyo selalu didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui forum Musrenbang. Dalam proses ini, pemerintah distrik berupaya



mengakomodasi aspirasi masyarakat terkait prioritas pembangunan, baik itu dalam sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Selain pembangunan fisik, pemerintah Distrik Aitinyo juga fokus pada pemberdayaan masyarakat. Program-program pemberdayaan masyarakat dirancang untuk meningkatkan kapasitas ekonomi warga melalui pelatihan keterampilan, penyediaan akses modal usaha, dan dukungan terhadap kelompok-kelompok usaha kecil.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan di tingkat distrik, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah menjadi prioritas penting. Pemerintah Distrik Aitinyo secara rutin mengadakan pelatihan bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial mereka, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal. Menurut hasil wawancara peneliti dengan Ibu OK (Kepala Seksi Urusan Umum Distrik Aitinyo) mengatakan bahwa :

"Peningkatan kapasitas aparatur merupakan prioritas kami. Pelatihan teknis dan manajerial bagi pegawai rutin dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat lebih baik. Kami juga terus berkolaborasi dengan pemerintah desa, terutama dalam koordinasi program pembangunan desa, agar penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Saya juga mau menambahkan sedikit terkait dengan fungsi pengawasan yaitu Fungsi pengawasan di distrik ini sangat penting untuk memastikan anggaran digunakan sesuai peraturan dan menghindari penyalahgunaan. infrastruktur jalan yang masih terbatas menjadi salah satu tantangan terbesar. "Kami terus berupaya mengatasi kendala ini melalui pembangunan jalan dan jembatan agar distribusi logistik dan program pemerintah berjalan lebih lancar.

Hasil wawancara di atas mengisyaratkan bahwa pemerintah distrik memiliki peran penting dalam mendukung pemerintah desa, terutama dalam hal koordinasi pelaksanaan program pembangunan desa. Kolaborasi ini tidak hanya membantu mempercepat realisasi program, tetapi juga memastikan bahwa penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengawasan adalah salah satu fungsi kunci yang dijalankan oleh pemerintah Distrik Aitinyo. Melalui fungsi ini, pemerintah distrik memantau pelaksanaan program dan penggunaan anggaran agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fungsi pengawasan juga bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya penyalahgunaan anggaran. Kondisi infrastruktur di Distrik Aitinyo masih menjadi tantangan utama. Banyak desa yang belum terhubung dengan akses jalan yang memadai, sehingga menyulitkan distribusi logistik dan pelaksanaan program-program pemerintah. Pemerintah distrik terus berupaya untuk mengatasi tantangan ini melalui program pembangunan jalan dan jembatan.

Dan wawancara dengan Bapak AW (Kepala Seksi Pemerintahan Distrik Aitinyo) yang mengatakan bahwa :

Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam pengawasan program-program kami. Melalui pengawasan partisipatif, masyarakat dapat memastikan bahwa program pemerintah benar- benar berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak yang positif. Kami selalu berkomitmen untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat melalui program bantuan untuk kelompok usaha kecil, pertanian, dan perikanan, yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat.

Selanjutnya terkait dengan keterlibatan masyarakat maka menurut hasil wawancara dengan ibu OK (Kepala Seksi Urusan Umum Distrik Aitinyo) yang mengatakan bahwa :



Kami menjalankan tugas disini juga selalu berkoordinasi dengan lembaga adat dan tokoh-tokoh masyarakat di sini. Betapa pentingnya sinergi dengan lembaga adat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan. Kearifan lokal menjadi dasar dalam setiap kebijakan yang kami buat bersama lembaga adat, sehingga pembangunan lebih mudah diterima oleh masyarakat," Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, kami optimis Distrik Aitinyo akan terus mengalami kemajuan yang berkelanjutan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan program pemerintah di Distrik Aitinyo merupakan elemen penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi. Melalui pengawasan partisipatif, masyarakat dapat berperan aktif dalam memastikan bahwa program-program pemerintah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak positif. Pemerintah Distrik Aitinyo berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan ekonomi. Program-program ini mencakup pemberian bantuan kepada kelompok usaha kecil, pembangunan infrastruktur ekonomi, serta dukungan terhadap sektor pertanian dan perikanan yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat. Di Distrik Aitinyo, peran lembaga adat sangat dihormati dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan. Sinergi antara pemerintah distrik dan lembaga adat diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang sesuai dengan kearifan lokal, sehingga program pembangunan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Pemerintah Distrik Aitinyo membutuhkan dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat, terutama dalam hal pendanaan dan bimbingan teknis. Dukungan ini penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat kapasitas pemerintahan di tingkat distrik. Tujuan utama dari pelaksanaan tugas pemerintah di Distrik Aitinyo adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta mempercepat pembangunan di wilayah yang masih tertinggal. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan Distrik Aitinyo dapat mencapai kemajuan yang berkelanjutan.

2. Hambatan atau kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah

Di distrik Aitinyo, birokrasi yang kompleks sering kali menjadi kendala utama dalam pelaksanaan tugas pemerintah. Menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak HB (Kepala Distrik Aitinyo) yang mengatakan bahwa :

"Kami sering kali menghadapi kendala besar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan akibat birokrasi yang kompleks. Prosedur yang panjang dan tidak efisien membuat pengambilan keputusan menjadi lambat dan kurang tepat waktu. Ini jelas menghambat implementasi program-program yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Salah satu masalah signifikan yang kami hadapi adalah rumitnya birokrasi; proses administrasi yang berbelit-belit sering kali memperlambat pengambilan keputusan. Akibatnya, program-program yang seharusnya segera dilaksanakan terhambat."

Senada dengan pernyataan di atas, maka Bapak RS mengatakan hal yang hampir sama yaitu :

"Menurut kami faktor yang menjadi kendala dalam dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di Distrik Aitinyo adalah keterbatasan infrastruktur, seperti jalan yang rusak



atau tidak memadai, semakin memperburuk keadaan. Hal ini menghambat aksesibilitas kami dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Kesulitan dalam mendistribusikan layanan dan program ke daerah terpencil menjadi tantangan besar, sehingga kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi dengan baik. Kami berharap ada langkah-langkah untuk menyederhanakan proses birokrasi dan meningkatkan infrastruktur agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal”

Pernyataan di atas mengisyaratkan bahwa prosedur yang panjang dan tidak efisien dapat menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan tepat waktu, sehingga memperlambat implementasi program- program yang diperlukan oleh masyarakat. Salah satu kendala signifikan yang dihadapi adalah birokrasi yang rumit. Proses administrasi yang panjang dan berbelit-belit sering kali memperlambat pengambilan keputusan, sehingga program-program yang seharusnya segera dilaksanakan menjadi terhambat. Hal ini terjadi karena keterbatasan infrastruktur di distrik Aitinyo, seperti jalan yang rusak atau tidak memadai, menghambat aksesibilitas dalam pelaksanaan tugas pemerintah. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mendistribusikan layanan dan program ke daerah terpencil, sehingga kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi dengan baik.

Kualitas dan kuantitas SDM dalam pemerintah seringkali tidak memadai. Banyak pegawai pemerintah yang kurang terlatih dan memiliki keterampilan yang tidak sesuai dengan tuntutan tugasnya. Ini menyebabkan ketidakmampuan dalam mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Berkaitan dengan penjelasan tersebut maka menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak HB (Kepala Distrik Aitinyo) yang mengatakan bahwa :

“Kami menghadapi berbagai tantangan serius terkait kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pemerintahan. Banyak pegawai yang kurang terlatih dan tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan tugas mereka. Hal ini mengakibatkan ketidakmampuan dalam mengimplementasikan kebijakan secara efektif.

Kendala anggaran juga menjadi faktor yang signifikan dalam efektivitas pelaksanaan tugas pemerintah. Seringkali, pemerintah menghadapi keterbatasan dana yang membuatnya sulit untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan. Hal ini berimbas pada kurangnya infrastruktur dan pelayanan publik yang optimal. Korupsi menjadi salah satu penyakit yang menggerogoti efektivitas pemerintah. Berdasarkan uraian di atas maka menurut hasil wawancara peneliti dengan Ibu OS (Bendahara Distrik Aitinyo) mengatakan bahwa :

“Kendala anggaran juga menjadi faktor signifikan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas pemerintah. Kami sering kali berhadapan dengan keterbatasan dana yang membuat sulit untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan. Dampaknya sangat besar, terutama dalam hal infrastruktur dan pelayanan publik yang optimal. Korupsi adalah salah satu penyakit yang menggerogoti efektivitas pemerintah. Penyalahgunaan wewenang oleh oknum-oknum tertentu dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya tidak hanya menurunkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga menghambat pencapaian tujuan pembangunan”.

Penyalahgunaan wewenang oleh oknum pemerintah dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga menghambat efektivitas tugas pemerintah. Ketidaklibatan masyarakat dapat menyebabkan kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga mengurangi relevansi program pemerintah. Menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak RS (Sekretaris Distrik Aitinyo) mengatakan bahwa :



“Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi kendala. Ketidaklibatan masyarakat sering kali menyebabkan kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka, sehingga mengurangi relevansi program pemerintah”

Pada beberapa daerah di Aitinyo, konflik sosial antara kelompok masyarakat dapat menghambat pelaksanaan program pemerintah. Ketegangan antara kelompok yang berbeda dapat mengganggu stabilitas dan keamanan, sehingga mempersulit upaya pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Senada dengan penjelasan di atas, maka menurut hasil wawancara peneliti dengan Ibu OK bahwa :

“Hal lain yang menjadi kendala bagi kami di Distrik Aitinyo adalah konflik sosial antara kelompok masyarakat juga menjadi masalah. Ketegangan antara kelompok yang berbeda dapat mengganggu stabilitas dan keamanan, sehingga mempersulit upaya pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Kami perlu menemukan cara untuk meningkatkan kualitas SDM dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan agar program-program kami dapat berjalan lebih efektif.

Informasi yang tidak merata mengenai program dan kebijakan pemerintah menyebabkan ketidakpahaman di kalangan masyarakat. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi yang efektif membuat banyak warga tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam berbagai program pemerintah. ketidakmampuan pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi menjadi kendala serius. Minimnya akses dan pemahaman tentang teknologi menghambat efisiensi dalam administrasi dan pelayanan publik.

Distrik Aitinyo sering kali menghadapi bencana alam seperti banjir atau tanah longsor. Kejadian ini dapat merusak infrastruktur dan mempengaruhi anggaran yang seharusnya digunakan untuk program pembangunan, sehingga memperlambat pelaksanaan tugas pemerintah. Ketidakstabilan politik di tingkat lokal dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas pemerintah. Perubahan kepemimpinan yang sering terjadi dapat mengakibatkan perubahan kebijakan yang tidak konsisten, mengganggu kontinuitas program yang telah direncanakan. Di beberapa kalangan, budaya korupsi yang telah mengakar membuat praktik yang tidak etis menjadi sulit dihilangkan. Hal ini mengurangi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan publik.

Pelaksanaan tugas pemerintah di Aitinyo sering kali terhambat oleh kurangnya koordinasi antarlembaga. Ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga dapat menyebabkan tumpang tindih atau bahkan kekosongan dalam pelaksanaan program. Banyaknya regulasi yang rumit dan tidak jelas di tingkat daerah dapat menghambat pelaksanaan tugas pemerintah. Ketidakpastian hukum ini menciptakan kebingungan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, serta meningkatkan risiko konflik hukum. Minimnya program pelatihan dan pengembangan bagi pegawai pemerintah mengakibatkan rendahnya kemampuan mereka dalam menjalankan tugas. Kurangnya pengetahuan terbaru dan keterampilan praktis membuat pemerintah sulit beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat.

Kondisi sosial ekonomi yang sulit, seperti tingginya tingkat kemiskinan, dapat menghambat efektivitas tugas pemerintah. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan sering kali memiliki kebutuhan mendesak yang tidak dapat terpenuhi oleh pemerintah, sehingga mengurangi kepercayaan mereka terhadap institusi pemerintah. kurangnya sistem evaluasi dan monitoring yang efektif menghambat perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas pemerintah. Tanpa evaluasi yang tepat, pemerintah tidak dapat mengidentifikasi masalah atau



area yang perlu ditingkatkan, sehingga tidak mampu memenuhi harapan masyarakat secara optimal.

3. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Distrik Aitinyo

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas pemerintahan di suatu daerah. Di Distrik Aitinyo, masyarakat memiliki harapan tinggi terhadap pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik dan memenuhi kebutuhan mereka. Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan tantangan yang dihadapi pemerintah. Menurut hasil wawancara peneliti dengan Ibu SA (masyarakat pengguna layanan) yang mengatakan bahwa :

“ Saya merasa pemerintah di sini cukup responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Misalnya, saat kami mengajukan permohonan untuk perbaikan jalan, mereka cepat tanggap ”

Pernyataan di atas menggambarkan adanya respons positif dari pemerintah, yang cepat tanggap dalam menangani permohonan perbaikan infrastruktur. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yang dapat meningkatkan tingkat kepuasan publik. Senada dengan hal tersebut di atas maka menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak DT (masyarakat pengguna layanan) yang menyatakan bahwa :

“Meskipun ada beberapa program yang berjalan baik, namun masih banyak yang perlu diperbaiki. Khususnya dalam hal transparansi anggaran”

Penjelasan ini mengisyaratkan bahwa meskipun ada program- program yang berjalan baik, kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi sorotan. Ketidakjelasan dalam penggunaan dana publik dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dan menimbulkan skeptisisme terhadap pemerintah. Selain pelayanan di bidang pemerintahan, masih ada juga kendala dari sisi pelayanan kesehatan. Menurut hasil wawancara peneliti dengan Sdr. RM (masyarakat pengguna layanan) yang menyatakan bahwa :

“Kami menghargai usaha pemerintah dalam meningkatkan fasilitas kesehatan, namun masih kurangnya tenaga medis menjadi kendala.”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa mengapresiasi upaya pemerintah dalam meningkatkan fasilitas kesehatan, tetapi mengungkapkan masalah kekurangan tenaga medis. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun fasilitas ada, kualitas pelayanan kesehatan tetap terganggu tanpa tenaga medis yang memadai.

Dengan demikian meskipun ada beberapa aspek positif, seperti responsivitas pemerintah dan peningkatan pelayanan publik, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Masyarakat menghargai upaya pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, namun menginginkan transparansi yang lebih baik, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta dukungan yang konsisten terhadap sektor-sektor penting seperti ekonomi lokal dan pertanian. Keterlibatan aktif pemerintah dalam mendengarkan aspirasi masyarakat serta perbaikan dalam komunikasi dan sosialisasi dapat meningkatkan kepercayaan publik dan menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan warga.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah di Distrik Aitinyo

Distrik merupakan unit pemerintahan yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal. Sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dan desa, distrik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah dapat diterapkan dengan baik di tingkat bawah. Hidayat, (2020:11) menjelaskan bahwa distrik memiliki peran strategis sebagai unit pemerintahan yang menghubungkan pemerintah



kabupaten dengan desa. Tugas distrik dalam hal ini meliputi koordinasi dan supervisi terhadap program-program pembangunan dan pelayanan publik, yang harus diterapkan dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Keberhasilan tugas ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah distrik dalam menjalin komunikasi efektif dan kolaborasi dengan pemerintah desa. Tugas ini mencakup koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan program-program yang ditujukan untuk pembangunan dan pelayanan publik, sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Keberhasilan tugas ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah distrik dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan pemerintah desa.

Selain itu, pemerintah distrik memiliki tiga fungsi utama: pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi pelayanan meliputi penyediaan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, sedangkan fungsi pembangunan berfokus pada pengembangan infrastruktur dan ekonomi daerah. Pemberdayaan masyarakat menjadi aspek penting dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat setempat. Lebih lanjut, Sutrisno (2021:172) menyoroti tiga fungsi utama pemerintah distrik, yaitu fungsi pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, fungsi pelayanan mencakup penyediaan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, sementara fungsi pembangunan difokuskan pada pengembangan infrastruktur dan ekonomi lokal. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas serta kualitas hidup warga melalui program-program yang memperhatikan kebutuhan loka. Dengan melakukan berbagai program yang mengedepankan kebutuhan masyarakat, pemerintah distrik berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga.

Namun, pelaksanaan tugas di tingkat distrik tidak selalu berjalan mulus. Tantangan geografis, seperti akses transportasi yang terbatas dan infrastruktur yang kurang memadai, dapat menghambat distribusi bantuan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Ramli (2023:45) menambahkan bahwa meskipun distrik memiliki peran penting, pelaksanaan tugas-tugasnya sering kali terganggu oleh tantangan geografis dan infrastruktur yang kurang memadai. Keterbatasan akses transportasi misalnya, dapat menghambat distribusi bantuan dan implementasi program pembangunan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah distrik, kabupaten, desa, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan dan pembangunan untuk menjaga akuntabilitas serta transparansi pemerintahan di tingkat distrik. Oleh karena itu, kolaborasi yang baik antara pemerintah distrik, kabupaten, dan desa menjadi sangat penting untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan partisipasi dalam proses pembangunan juga menjadi kunci dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi, sehingga program-program yang dijalankan dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan berkontribusi pada kemajuan distrik secara keseluruhan.

Hambatan atau kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah

Distrik Aitinyo menghadapi sejumlah tantangan signifikan dalam pelaksanaan tugas pemerintah, terutama terkait dengan birokrasi yang kompleks dan prosedur administrasi yang panjang. Suryana (2021:77) menegaskan bahwa kompleksitas birokrasi dan ketidakefisienan dalam proses pengambilan keputusan merupakan tantangan utama bagi pemerintah distrik dalam mengimplementasikan program-program yang dibutuhkan masyarakat. Kondisi ini diperburuk oleh infrastruktur yang tidak memadai, seperti jalan yang rusak, yang



memperlambat distribusi layanan ke daerah terpencil dan menyebabkan ketidakpuasan di kalangan warga. Ketidakefisienan dalam proses pengambilan keputusan sering kali menghambat implementasi program- program yang diperlukan oleh masyarakat. Rumitnya birokrasi ini diperburuk oleh kondisi infrastruktur yang tidak memadai, seperti jalan yang rusak, yang mengakibatkan kesulitan dalam mendistribusikan layanan ke daerah terpencil. Akibatnya, kebutuhan masyarakat tidak dapat terpenuhi dengan baik, dan hal ini menimbulkan frustrasi di kalangan warga yang mengharapkan pelayanan yang lebih cepat dan efektif.

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) di pemerintah distrik juga menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas. Menurut Pratama (2022:98), kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di pemerintah distrik masih menjadi kendala besar. Banyak pegawai yang kurang terlatih dan tidak memiliki keterampilan yang memadai, sehingga menghambat implementasi kebijakan secara efektif. Selain itu, keterbatasan anggaran dan korupsi dalam pengelolaannya turut menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang berdampak negatif pada pencapaian tujuan pembangunan. Banyak pegawai pemerintah yang kurang terlatih dan tidak memiliki keterampilan yang sesuai, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk mengimplementasikan kebijakan dengan efektif. Selain itu, kendala anggaran menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi efektivitas program-program pemerintah. Keterbatasan dana sering kali menghambat pelaksanaan inisiatif yang telah direncanakan, berimbas pada layanan publik yang tidak optimal. Korupsi dalam pengelolaan anggaran juga semakin memperburuk situasi ini, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan.

Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi masalah yang tidak kalah penting. Susanto (2023:45) menyoroti rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sebagai salah satu penyebab kebijakan yang kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, konflik sosial antar kelompok masyarakat sering kali mengganggu stabilitas di Distrik Aitinyo, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan program-program pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pengembangan teknologi informasi serta pelatihan bagi pegawai pemerintah untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan pelayanan publik di distrik tersebut. Ketidaklibatan warga sering kali mengakibatkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mengurangi relevansi program pemerintah. Konflik sosial antar kelompok masyarakat di distrik Aitinyo juga dapat mengganggu stabilitas dan efektivitas pelaksanaan program. Diperlukan langkah- langkah strategis untuk meningkatkan komunikasi dan sosialisasi mengenai program pemerintah kepada masyarakat. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta pelatihan bagi pegawai pemerintah, menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan pelayanan publik di distrik ini.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Distrik Aitinyo

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pemerintahan di suatu daerah. Wibisono (2020) menyatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas pemerintahan, terutama dalam hal pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar. Responsivitas pemerintah terhadap permohonan masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur, sangat dihargai, namun tantangan-tantangan seperti birokrasi dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran masih menjadi masalah utama yang



menghambat peningkatan kepuasan. Di Distrik Aitinyo, masyarakat memiliki harapan tinggi terhadap pemerintah untuk memberikan pelayanan yang memadai dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Responsivitas pemerintah dalam menangani permohonan masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur, menjadi salah satu aspek yang dihargai. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa meskipun ada usaha dari pemerintah, tantangan-tantangan tertentu masih perlu diatasi untuk meningkatkan kepuasan masyarakat secara keseluruhan.

Masyarakat menghargai adanya program-program yang berjalan baik, tetapi mereka juga menyoroti kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran sebagai isu yang signifikan. Sari (2021:88) menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran publik sebagai elemen kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketidakjelasan dalam penggunaan dana publik sering kali menyebabkan skeptisisme di kalangan masyarakat, yang berdampak negatif terhadap hubungan antara pemerintah dan warganya.

Di sektor pelayanan kesehatan, Hakim (2023:16) menjelaskan bahwa meskipun infrastruktur telah ditingkatkan, kekurangan tenaga medis juga menjadi kendala yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur yang baik tidak dapat menjamin kualitas pelayanan tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, pemerintah perlu memfokuskan perhatian pada peningkatan sumber daya manusia, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta transparansi dalam pengelolaan dana publik. Ketidakjelasan dalam penggunaan dana publik dapat menimbulkan skeptisisme dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, masalah lain muncul di sektor pelayanan kesehatan, di mana walaupun fasilitas telah ditingkatkan, kekurangan tenaga medis menjadi kendala utama dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur yang baik tidak cukup tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai.

Meskipun ada beberapa aspek positif, masyarakat di Distrik Aitinyo masih berharap akan adanya perbaikan lebih lanjut. Mereka menginginkan transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran, peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta dukungan yang konsisten untuk sektor-sektor penting seperti ekonomi lokal dan pertanian. Keterlibatan aktif pemerintah dalam mendengarkan aspirasi masyarakat, bersama dengan perbaikan komunikasi dan sosialisasi, dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik. Dengan demikian, hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat dapat terjalin, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintah di masa mendatang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- Pemerintahan distrik memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan publik di tingkat lokal, berfokus pada pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dan desa, mereka bertanggung jawab untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat diperlukan untuk mengatasi tantangan seperti keterbatasan akses dan infrastruktur, guna menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup warga.
- Pemerintahan Distrik Aitinyo menghadapi tantangan terkait birokrasi yang kompleks,



infrastruktur yang tidak memadai, dan kualitas sumber daya manusia yang rendah. Ketidakefisienan dalam pengambilan keputusan dan keterbatasan anggaran menghambat implementasi program yang dibutuhkan masyarakat. Masalah korupsi dan rendahnya partisipasi masyarakat memperburuk situasi ini. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti meningkatkan komunikasi dan sosialisasi program pemerintah, mengembangkan teknologi informasi, serta melatih pegawai pemerintah.

- Tingkat kepuasan masyarakat di Distrik Aitinyo merupakan indikator penting untuk menilai efektivitas pemerintahan. Harapan tinggi terhadap pelayanan dan responsivitas pemerintah terhambat oleh kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kekurangan tenaga medis. Masyarakat menginginkan perbaikan dalam transparansi, peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta dukungan berkelanjutan untuk sektor vital. Keterlibatan aktif pemerintah dalam mendengarkan aspirasi masyarakat dan memperbaiki komunikasi diharapkan dapat membangun kepercayaan publik dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintah di masa mendatang.

5. DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. 2000. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta

Kettl, D. F. (2020). *"The Divided States of America: Why Federalism Doesn't Work."* Princeton University.

Press Stillman II, R. J. (2015). *Public Administration: Concepts and Cases*. Cengage Learning.

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (2014): Panduan Praktis Pengembangan dan Pengukuran Indikator Kinerja

Mahendra, I. W. (2019). *"Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah."* UPP STIM YKPN.

Rosenbloom, D. H., Kravchuk, R. S., & Clerkin, R. M. (2019). *"Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector."* McGraw-Hill Education.

Sutopo, H. B. (2013). *"Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah."* Bumi Aksara.

Kuncoro, S. (2017). *"Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah."* UPP STIM YKPN.

Sutarman, dkk. (2021). *"Tantangan dan Kendala Implementasi Kebijakan Publik."* Penerbit Arga.

Pemda Kota Batam (2022). *Pedoman Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)*



Sugiyon, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. CV. Alfabeta, Bandung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.[https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/25TAHUN2009UU. htm](https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/25TAHUN2009UU.htm)